PENGAWASAN PERIZINAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) PERGUDANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016

Oleh : Rio Chandra
Pembimbing : Drs. Erma M, M.Si
(Chandrario422@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 – Telp/Fax.
0761 – 63277

Abstract

This research is based on the decisions issued by the Indonesian republic's trade ministry who want the arrangement of the warehouse list sign permit. The purpose of this research is to analyze about how the supervision done by municipal government Pekanbaru as executor of regional autonomy in this case executed by service in charge of commerce.

This research is descriptive. This study aims to describe how the real situation in the field accurately and systematically related to research and fact analysis, as well as field observation and data or information obtained. Methods of data collection is done by way of interviews and documentation.

The results showed that the policy issued by the minister of commerce of the Republic of Indonesia which became the guideline for the new city government to supervise the warehousing can not be done because there is no regulation peaksana of law number 23 year 2014 about the local government in which regulate the division of authority between the government region / city and province. This is seen from some data provided by the capital investment and integrated services one door kota Pekanbaru which the data since the year of the enactment of policies and regulations regarding the obligation to have the warehouse list licensing list is only 287 warehouses who have the license list warehouse list of 372 warehouse who has been taking care of HO interference permissions. Thus the results of this study indicate that from the data that has been described in this study that the number of warehouses that have permission HO disturbance is not directly proportional to who has a warehouse sign permit.

Keywords ; Supervision, Policy, Warehouse, Warehouse Registry, and HO.

PENDAHULUAN

Gudang sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yakni gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Atau pengertian gudang menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai sebagai tempat penyimpanan / penumpukan barang-barang perniagaan baik gudang khusus maupun bagian bangunan ruko/ruang lainnya.

Saat ini yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru ada 413 gudang yang telah memiliki izin HO, yang telah menyumbang PAD untuk kota Pekanbaru dari sektor retribusi izin gangguan terhadap gudang dan tersebar di 12 kecamatan di Pekanbaru, kemudian menurut data yang juga didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, hanya ada 287 gudang terdaftar yang telah memiliki surat izin tanda daftar gudang yang tersebar disepuluh Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Dari kedua data diatas dapat kita lihat perbedaan jumlah gudang yang telah memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan yang hanya mempunyai surat izin gangguan HO, padahal terhitung mulai tahun 2014, setiap gudang yang ada wajib memiliki TDG sebagai syarat wajib bagi seluruh perusahaan atau perorangan yang memiliki/menyewa gudang untuk

menyimpan barang-barang yang akan diperdagangkannya.

Pengawasan terhadap pergudangan secara jelas disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, bahwasanya yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap gudang adalah Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit PTSP¹, dalam hal ini yang membidangi Dinas perdagangan di Pekanbaru adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pengawasan dalam hal ini juga dianggap sangat perlu dilakukan agar pemilik dan pengelola gudang tertib dalam mengurus perizinan yang disebut dengan surat Tanda Daftar Gudang yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak perorangan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan tentang pergudangan dan untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Serta sebagai Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatur keberadaan dan fungsi dari gudang-gudang tersebut. Sehingga kedepannya tidak ada lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat ataupun Pemerintah itu sendiri.

Tinjauan teori

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Dalam hal ini penilaian atau evaluasi dilaksanakan secara terukur, dengan kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target yang diinginkan.

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014

Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkrit menemukan hambatan apa yang terjadi. Berikut tentu saja menemukan solusi yang tepat.

Agar supaya pengawasan itu dapat berjalan dengan baik maka pihak pengawas juga dilengkapi dengan hak-hak untuk mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap sesuatu daerah dan juga hak untuk menjatuhkan sanksi.

Di Indonesia pengawasan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari;
3. Mempermudah atau memperingan tugas-tugas pelaksana karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan-kesibukan sehari-hari;
4. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.²

Pengawasan menurut Siagian akan berlangsung efektif apabila memiliki ciri yang dibahas sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.

3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tertentu. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif.
5. Keleluasaan pengawasan. Pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan mengatas namakan kecanggihan sistem pengawasan, dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan secara efektif seperti berbagai rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang rinci dan data-data statistik.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya, pengawasan yang baik menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan tersebut.

² Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta, PolGov, 2012, hal. 315

10. Pengawasan harus bersifat membimbing.³

Controlling atau pengawasan menurut Tarmidji ialah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jadi pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, sudah berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pelaksana dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan-kesalahan yang baru
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan biaya/pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan terarah dan tepat kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program dan tingkat pelaksanaan seperti dalam perencanaan atau tidak
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁴

Dalam pengawasan secara umum dikenal dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah

tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan DPRD, maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang di nilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁵

Ada beberapa bentuk dari pengawasan seperti :

1. Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Jadi pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi

2. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh

³ Siagian, dan P, sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, edisi refisi, Jakarta, Pt. Bumi Aksara, 2007, hal. 130

⁴ Tarmidji, Zaini, *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintah Daerah*, Bandung, Angkasa, 1992, hal. 3

⁵ Hanif Nurcholli, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (edisi revisi, Jakarta, Grasindo, 2007, hal. 313

setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang akan, sedang atau sudah dilakukan

3. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Apabila pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembanguana fisik maka pemeriksaan di tempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik lapangan.

4. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau melakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

5. Pengawasan atasan langsung

Pengawasan atasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

6. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang secara fungsional oleh aparat pengawasan.

7. Pengawasan lintas sektoral

Pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan yang harus dilakukan dua atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral, yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut.⁶

Rumusan masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah ;

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menertibkan pergudangan yang ada di Pekanbaru ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan untuk menertibkan pergudangan di Pekanbaru ?

Tujuan dan manfaat penelitian

1. tujuan penelitian

- 1.1. Untuk mengetahui usaha Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan untuk menertibkan perizinan tanda daftar gudang pergudang yang ada di Pekanbaru
- 1.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan tanda daftar gudang pergudangan di Pekanbaru

2. Manfaat penelitian

- 2.1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah untuk mengetahui solusi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perizinan tanda daftar gudang pergudangan di Kota Pekanbaru
- 2.2. Untuk mengetahui dan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah yang sama
- 2.3. Untuk menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan

⁶ *Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Pt Ghalia Indonesia. 2003, hal. 26*

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data-data yang didapat tersebut didapat dari wawancara, data media massa, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya.

Jenis penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai relatif
2. Pada umumnya dilakukan pada penelitian sosial
3. Hasilnya bersifat obyektif, berlaku sesaat dan setempat.⁷

2. Jenis dan sumber data penelitian

2.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni penulis menggunakan data :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang didapat langsung dari objek yang diteliti atau informan. Informan merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu berasal dari wawancara dengan para informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip dari beberapa sumber lain sehingga tidak bersifat otentik lagi, sebab data tersebut sudah berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, koran dan sebagainya, yang berkaitan tentang pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perdagangan di Pekanbaru.

2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dalam penelitian ini yang menjadi informan, yang akan dimintai keterangan yang diperlukan selama proses penelitian serta dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian ini.

1. Informan

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Dalam penelitian ini, dalam memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek yang tepat berdasarkan tujuan.

Penentuan subjek berdasarkan tujuan dilakukan untuk meningkatkan kegunaan dan keakuratan informasi. Peneliti memilih subjek yang mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai hal yang sedang diteliti. Informan di sini merupakan orang yang benar-benar mengetahui segala macam informasi yang dibutuhkan penulis dalam menunjang penulisan penelitian ini.

Tabel informen penelitian

n o	Nama	Jabatan	jumlah
1	Hendri Yusalm, S.sos	Kasi pengawasan DPMPTSP	1
2	Hidayat Alfitri, S.E	Kasi pelayanan perizinan DPMPTSP	1
3	Nur Baitty S.sos	Kasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1
4	Mas Irba	kabid Perdagangan Dinas	1

⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti*

pemula, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, hal. 113

		Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	
5	Asril Encik	kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Provinsi Riau	1
6	Budi Mulia,S .H	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1
7	Annita	Pemilik Gudang	1
	jumlah		7

2. Dokumen

Dokuman yang dimaksud adalah berbagai sumber data yang dapat berbentuk surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

3.1. Wawancara

wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.⁸

3.2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dan meneliti data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari sejumlah dokumen terkait

berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan pengawasan pergudangan di Kota Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1.1. Bentuk Pengawasan

Meskipun penerbitan izin tanda daftar gudang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga terlibat dalam hal perekomendasi suatu badan usaha seperti gudang dalam pengurusan izin beberapa surat. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran informasi yang dicantumkan oleh pemilik gudang yang telah merekomendasikan pembuatan surat izin tanda daftar gudang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Hal tersebut diperjelas oleh hasil wawancara peneliti dengan kasi pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial (suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial*

lainnya,. Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 67-68.

“Pengawasan terhadap gudang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena hal ini adalah tugas pokok dan fungsi dari mereka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya mengeluarkan izin saja dan teknis dilapangan dilakukan oleh mereka. Sedangkan pengawasan oleh kami biasanya hanya dilakukan pada saat menjelang Ramadhan dan akhir tahun saja yang biasanya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, atau jika diperlukan saja. (wawancara dengan Bapak Hidayat Alfitri SE Kepala Seksi Pelayanan Perizina Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 14 juli 2017 pukul 15.00 wib)”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanyalah mediasi atau fasilitator saja, yang menerbitkan perizinan tanda daftar gudang.

Meskipun wewenang pengawasan berada pada Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, namun ada beberapa waktu yang bisa jadi melibatkan beberapa instansi terkait, hal ini untuk memaksimalkan pengawasan yang dilakukan karena sudah ada tupoksi masing-masing dari instansi tersebut.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah :

1. Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasa yang dilakukan langsung kepada lokasi pergudangan oleh dinas Pedagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014. Berkaitan dengan proses pengawasan, selalu yang utama adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan terhadap gudang dilakukan sendiri oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian ke masing-masing gudang yang ada dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Adapun yang diawasi dan diperiksa adalah dokumen-dokumen perizinan dari gudang tersebut apakah sudah memiliki izin tanda daftar gudang atau belum, dan perizinan yang lainnya. (wawancara dengan Ibu Nur Batty S, Sos Kepala Seksi Tertib Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru tanggal 14 juli 2017)”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan hanyalah pemeriksaan dokumen perizinan saja, hal ini tentu saja kurang maksimal, karena tidak adanya wewenang untuk memeriksa barang-barang yang disimpan di dalam gudang yang berguna untuk menghindari penimbunan barang. Karena walau bagaimanapun tujuan dari pengawasan terhadap gudang adalah untuk mengatur ketersediaan barang untuk konsumsi masyarakat. Adapun yang mempunyai wewenang terhadap pengawasan pendistribusian barang adalah Dinas Pedagangan Provinsi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“Pengawasan terhadap gudang tidak menyangkut pemeriksaan kebenaran barang-barang apa saja yang disimpan di dalam gudang sesuai dengan dokumen resi gudang, karena hal ini adalah tugas atau wewenang dari Dinas Perdagangan Provinsi.” (wawancara dengan Ibu Nur Batty S, Sos Kepala Seksi Tertib Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru juli 2017)

Dari bentuk pengawasan langsung yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, jelas terlihat bahwa pengawasannya masih belum bisa maksimal karena pengawasannya hanya berupa pengawasan terhadap dokumen perizinan saja, hal ini dikarenakan wewenang pengawasan terhadap kebenaran barang-barang yang disimpan di dalam gudang berada pada Dinas Perdagangan Provinsi. Bisa jadi gudang yang ada juga melakukan aktifitas produksi yang tentunya menyimpang dari fungsi gudang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“Masalah yang terjadi di lapangan adalah karena kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota dialihkan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi, hal ini tentu mengakibatkan pengawasan yang dilakukan terhadap gudang tidak dapat dilakukan oleh dinas perdagangan kota pekanbaru, dan pembagian kekuasaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dinas perdagangan kota pekanbaru tetap melakukan pengawasan terhadap gudang sebagai tugas melekat yang ada pada dinas perdagangan jika ada keluhan dari masyarakat karena kenaikan harga barang pokok akibat dari kelangkaan barang di pasar”. (wawancara dengan Bapak Mas Irba Kepala Bidang Pedagangan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan kewenangan pengawasan terhadap gudang tidak dapat dilakukan oleh Dinas

Perdagangan Kota Pekanbaru sampai dengan masa berakhirnya tempo waktu yang diberikan untuk membuat peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut oleh pemerintah berwenang. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 13 ayat 3 pada undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan pengawasan terhadap pergudangan berada pada Dinas Perdagangan Provinsi. Kemudian dalam undang-undang ini juga diatur bahwa segala aturan pelaksanaan, termasuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pembagian urusan Pemerintah harus ditetapkan paling lambat dua tahun setelahnya yaitu berakhir tanggal 30 september 2016. Dan faktanya sampai dengan tempo yang telah ditetapkan belum ada pengaturan lebih lanjut terhadap hal ini oleh Pemerintah.

Maka dengan itu, sesuai dengan undang-undang ini juga Pemerintah Daerah berhak membuat pengaturan tersendiri untuk penyelenggaraan otonomi Daerah. Hal inilah yang menyebabkan baru ada kebijakan terhadap pengawasan terhadap pergudangan di Kota Pekanbaru sejak oktober 2016, yang efektif terlaksana tahun 2017.

Adapun jika mengacu kepada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menunjuk Dinas Perdagangan Provinsi sebagai instansi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pergudangan peneliti telah melakukan wawancara sebagai berikut :

“Pengawasan terhadap pergudangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi hanyalah berupa pengawasan terhadap pendistribusian barangnya saja bukan pengawasan fisik terhadap pergudangan karena hal ini kurang sejalan dengan PP Nomor 18 tahun 2016 yang menginginkan asas diantaranya efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas. Dan belum ada

peraturan yang menyebutkan atas perubahan pengaturan ini, maka dari itu pengawasan terhadap perizinan tanda daftar gudang tidak dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi tetapi dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota. (wawancara dengan Bapak Asril Encik, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Riau)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaturan lebih lanjut yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perizinan tanda daftar gudang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi karena tidak sejalan dengan PP Nomor 18 tahun 2016.

Keterangan diatas dapat dipahami bahwa tidak ada pengawasan terhadap gudang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena terjadi kerancuan atas peraturan yang ada sebelumnya yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menghendaki ada pengaturan lebih lanjut mengenai aturan tersebut namun sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada pengaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait.

Selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga ada Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut serta melakukan pengawasan sebagai pendampingan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Hal ini biasanya terjadi pada saat menjelang bulan Ramadhan dan tahun baru yang permintaan barang di pasaran lebih tinggi dari biasanya.

Kemudian instansi yang terakhir yang juga ikut melakukan pengawasan adalah yang mengeluarkan atau menerbitkan izin pergudangan sendiri yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Pengawasan juga dilakukan oleh DPMPTSP karena kami juga memiliki tim pengawas yang mengawasi apakah gudang yang ada masih mematuhi peraturan yang telah disepakati yaitu apakah gudang sudah memiliki izin TDG, IMB, HO dan sebagainya. Ataupun apakah gudang tersebut masih sesuai dengan peruntukan dan luas sesuai dengan perizinan.

Pengawasan dalam hal ini menggunakan pendekatan persuasif kepada pengelola gudang agar mematuhi peraturan yang ada dan hanya beberapa waktu saja diambil langkah tegas bagi pemilik gudang yang tidak memiliki iktikat baik” . (wawancara dengan Bapak Hendri Yusalim S,Sos, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 14 juli 2017)

Adapun hal-hal yang diawasi adalah perizinannya saja.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mengeluarkan izin, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan izin pergudangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirim surat perintah langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit penegak peraturan daerah untuk turun langsung kelapangan mengecek izin dari pergudangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

1.2. Aspek pengawasan

Aspek-aspek pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Perizinan

Perizinan gudang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Dalam hal ini, adapun izin yang harus diurus oleh setiap pemilik gudang dalam melakukan atau menyewa gudang adalah dengan melengkapi izin gangguan (HO), surat izi tempat usaha (SITU), tanda daftar gudang (TDG) serta beberapa tambahan perizinan jika di perlukan.

Dalam proses pengawasan perizinan ini tidaklah menyulitkan pihak pengelola atau pemilik gudang sama sekali karena dalam pengurusannya tidak dipungut biaya sepersenpun, kecuali retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik gudang. Pengurusan surat perizinan juga tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat dikatakan pengurusan perizinan sangat mudah dan tidak menyulitkan pemilik gudang.

2. Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, ada beberapa ketentuan tentang retribusi, diantaranya yakni :

1. Pasal 1 ayat15 retribusi izin gangguan adalah adalah suatu pungutn yang harus dibayar/dilunasi oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.
2. Pasal 10 ayat 1 retribusi dihitung didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan,

indeks lokasi jalan dan tarif satuan retribusi gangguan.

3. Pasal 10 ayat 6, diatur besarnya tarif retribusi sebagai berikut ;
 - a. Untuk luas ruangan 01 s/d 100 m² ... 8.000,00 / m²
 - b. Untuk luas ruangan 101 s/d 200 m² ... 7.000,00 / m²
 - c. 201 m² keatas dikenakan biaya tambahan ... 1.000,00 / m²

Penambahan ini dihitung setelah didapati perkalian 200 meter

4. Pasal 12 ayat 2, masa retribusi izin gangguan berlaku selama satu tahun
5. Pasal 12 ayat 3, izin gangguan berlaku selama lma tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi

Pembayaran retribusi pergudangan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap satu tahun sekali, dan teknis pembayaran ini adalah dengan cara pemilik gudang datang langsung ke DPMPTS untuk membayar retribusi dan DPMPTSP hanya menunggu pemilik gudang melakukan pembayaran, dan jika didapati pemilik gudang tidak melakukan pembayaran retribusi maka DPMPTSP akan melakukan pantauan dan menyurati gudang agar melakukan pembayaran retribusi.

3. Waktu Pengawasan

Tidak ada peraturan yang secara khusus membahas tentang kapan waktu dilakukannya pengawasan terhadap gudang, dan oleh karena itu masing-masing Instansi membuat jadwal pengawasannya masing-masing sesuai dengan keperluannya masing-masing.

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu melakukan pengawasan biasanya dilakukan

pada saat menjelang bulan puasa dan tahun baru saja (wawancara dengan kasi pelayanan perizinan DPMPTS bapak Hidayat Alfitri SE). Atau jika ada surat perintah tugas (SPT) dari kepala dinas, hal ini biasanya jika ada pengaduan dari masyarakat yang kemudian staff akan melakukan pengecekan kelokasi, kemudian akan dibentuk tim untuk mementau jika pengaduan itu benar adanya setelah dilakukan pengecekan, dan dilapangan dalam melakukan akan senantiasa digunakan cara persuasi". (wawancara dengan kasi pengawasan DPMPTSP Bapak Hendri Yusalim S.Sos)

"Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan adalah sebanyak 6 kali setiap tahunnya, yaitu hanya dua bulan setiap tahunnya dan sebanyak 3 kali perbulannya. Hal ini karena anggaran yang ada hanya dianggarkan demikian, namun jika ada beberapa faktor yang mengharuskan dilakukan pengawasan terhadap gudang maka dana yang digunakan adalah dari sisa anggaran yang ada". (wawancara dengan Kasi pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Ibu Nur Baitty S,Sos)

"Satuan Polisi Pamong Praja setiap hari kerja melakukan patroli, untuk melakukan pantauan dan penjagaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan menjaga agar tidak ada terjadi pelanggaran terhadap peraturan Daerah Kota Pekanbaru oleh perorangan maupun kelompok, dan adapun pengawasan yang lain adalah jika ada instansi tertentu menginginkan pendampingan Satpol PP dalam menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran peraturan daerah". (wawancara

dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Budi Mulia SH).

Tidak adanya pengaturan terhadap kapan waktu yang jelas dalam melakukan pengawasan tentunya membuat beberapa instansi terkait melakukan inisiatif sendiri, dan hal ini tentu tidaklah menjadi masalah selama pengawasan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak menyalahi wewenang dan tanggung jawab setiap instansi terkait.

1.3. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pergudangan

1. Kendala Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini tindakan dan perilaku aparat menjadi sangat penting dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, karna jika baik aparatur pemerintahannya dalam bersikap dan berperilaku maka akan baik pula hasilnya.

Dalam hal mengawasi pergudangan sebagai suatu upaya mengontrol dan mengawasi pergudangan yang ada, ada beberapa kendala yang berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan tersebut. Salah satunya sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah anggota yang diturunkan dalam melakukan pengawasan.

Kurangnya pemahaman aparat tentang pergudangan juga merupakan kendala yang serius dalam melakukan pengawasan, bagaimana mungkin aparat yang diturunkan akan maksimal dalam melakukan pengawasan jika pengetahuannya tentang masalah pergudangan ini sangat minim sekali. Untuk itu dianggap sangat perlu terlebih dahulu aparatur yang bertugas dalam melakukan pengawasan ini dibekali ataupun mereka sendiri yang mencari tau apasaja hal-hal yang berkaitan dengan gudang, sehingga dalam melakukan pengawasan tidak terdapat lagi kebingungan dalam menerapkan aturan-aturan yang ada dan minimnya terjadi gesekan antara pengawas dan pemilik gudang.

Kemudian kurangnya rasa tanggung jawab dan inisiatif dari aparat dalam melakukan pengawasan secara langsung kelokasi pergudangan juga menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan terhadap gudang karena tanggung jawab tersebut dianggap hanya menjadi tanggung jawab dari atasan yang jika hanya ditugaskan untuk melakukan pengawasan barulah aparat bawahan akan turun kelapangan atau diproses permasalahannya. Dengan kata lain, pengawasan hanya akan dilakukan jika ada surat perintah tugas dari atasan.

2. Kendala Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Permasalahan ini terjadi karena dalam melaksanakan tugasnya aparat yang melakukan pengawasan terhadap gudang tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) terhadap pengawasannya, karena bagaimanapun standar ini haruslah ada sebagai pedoman pengawasan terhadap gudang. SOP penting karena dengan begitu akan didapati keteraturan jadwal pengawasan, anggaran yang jelas, dan anggota yang memadai dalam melakukan pengawasan.

Kenyataannya adalah aparat Pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki pedoman SOP yang jelas berkaitan dengan waktu pengawasan, sehingga yang terjadi dalam melakukan pengawasannya aparat Pemerintah Daerah tidak secara berkala. Pengawasan menjadi tidak maksimal dan tidak serius, sehingga terkesan antara ada dan tiada. Dan apabila ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan masalah-masalah baru yang tentunya akan merugikan masyarakat dan justru menguntungkan pemilik gudang serta pihak-pihak tertentu dan justru menguntungkan pemilik gudang serta pihak-pihak tertentu.

3. Kendala Manajemen dan Koordinasi

Yang dimaksud dengan manajemen dalam melakukan pengawasan yaitu suatu

proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengaturan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan pengawasan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilakukan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal.

Manajemen dan koordinasi yang terstruktur dan jelas sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap gudang. Dengan kata lain semuanya harus didukung penuh oleh aparat yang terkait didalamnya yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dinas yang mengeluarkan izin melakukan pengawasan terhadap gudang yang telah diberikannya surat perizinan kemudian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Atau pun Dinas Perdagangan Provinsi sebagai dinas yang diberikan tugas melakukan pengawasan juga melakukan pengawasan karena itu merupakan tugas dan fungsinya dalam mengatur perdagangan dan perindustrian dan yang terakhir Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan tugas untuk melakukan penertiban terhadap Peraturan Daerah yang dalam hal ini digunakan acuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Permasalahan yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya manajemen dan koordinasi aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, menjadikan banyak dari mereka tidak tau dengan betul apa sebenarnya tugas yang harus dilakukannya. Karena tidak adanya manajemen dalam mengatur rencana pengawasan terhadap pergudangan, sehingga tidak ada waktu yang tetap dalam mengawasi gudang. Seharusnya dalam melakukan pengawasan ini dibuatkan perencanaan waktu yang teratur dan berkala, sehingga keberadaan gudang dapat dikontrol dan dicegah dari hal-hal normatif, sehingga tujuan dari

pengawasan itu dapat tercapai dengan baik dan tepat.

Selanjutnya permasalahan eksternal yang dirasakan adalah kurangnya koordinasi antara aparat terkait dalam melakukan pengawasan, yaitu Antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota ataupun Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Satuan Polisi Pamong praja sebagai tim yustis yang bertanggung jawab terhadap pergudangan, sehingga menjadikan pengawasan menjadi kurang maksimal.

4. Kendala Pengaturan Kebijakan Pemerintah

Seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya, bahwa pengaturan terhadap pengawasan pergudangan mengalami hambatan kewenangan yaitu antara Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Perdagangan Provinsi. Oleh karena dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengawasan pergudangan seharusnya berada pada dinas perdagangan provinsi sesuai dengan pasal 13 ayat 3. Sedangkan menurut Dinas Perdagangan Provinsi jika pengawasan pergudangan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi maka tidak sejalan dengan PP Nomor 18 tahun 2016 yang menginginkan asas efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan di beberapa dinas terkait dan kepada pemilik gudang dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Dinas Perdagangan sebagai Dinas yang ditunjuk untuk mengawasi gudang juga tidak memiliki data mengenai berapa banyak jumlah gudang yang ada di Kota

Pekanbaru, berapa yang memiliki izin dan berapa yang belum mengurus surat izin. Sedangkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru juga tidak memiliki berapa gudang yang belum mengurus perizinan, karena tidak pernah dilakukan pantauan menyeluruh terhadap gudang dan gudang yang diawasi adalah gudang yang sudah mengurus perizinan saja.

2. Pengawasan terhadap pergudangan di Kota Pekanbaru tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena tidak adanya kebijakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap perizinan tanda daftar gudang, karena adanya kekeliruan kewenangan antara Dinas Perdagangan Kota dan Dinas Perdagangan Provinsi.
3. Belum ada sanksi tegas yang diberikan Pemerintah terhadap gudang yang belum mengurus izin tanda daftar gudang yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum pemilik gudang dalam mengurus izin terhadap tanda daftar gudang.

2. Saran

Adapun saran bagi penulis terhadap pengawasan terhadap perizinan tanda daftar gudang di kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah betul-betul serius dan maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap gudang yang ada agar segera mengurus izin tanda daftatr gudang guna menertibkan gudang. Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah daerah kota pekanbaru melakukan koordinasi dengan berbagai instansi sampai kepada tingkat RW.
2. Seharusnya pemerintah segera membuat kebijakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak terjadi kekeliruan kewenangan antara Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru dan

Dinas Perdagangan Provinsi sehingga kedepannya tidak lagi terjadi hal yang seperti ini

3. Untuk memberikan efek jera terhadap pemilik gudang yang melanggar aturan, Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, Josef Riwu. (2012). *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Manulung, M. (1977). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Murhaini, Suriansyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (edisi revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian. dan P, sondang. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*, edisi refisi. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sujamto. (2003). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. jakarta: Pt Ghalia Indonesia.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial (suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya)*. bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Tarmidji, Zaini. *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintah Daerah*. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah

Di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Jurnal/Skripsi:

M. Rifki Ichtiar. Pemberian Izin Pergudangan di Kota Bandar Lampung. Lampung : Universitas Lampung.

Internet:

www.riauone.com (Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2016 Pukul 10.34 WIB)